

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pendanaan secara mandiri sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi ekonominya untuk menghasilkan dana serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah kadang-kadang menghadapi tantangan karena percaya bahwa belanja modal dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pegawai dibandingkan untuk Belanja Modal, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat (Angelina dkk, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Catherine pada tahun 2024 tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian didapatkan rasio ketergantungan untuk periode tiga tahun (2020–2022) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat tinggi dengan rata-rata 64,49%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat (Meidina dkk, 2024).

Karena dana transfer dari pusat lebih dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akibatnya kemampuan daerah untuk membiayai belanja modal secara mandiri menjadi terbatas. Hal ini bisa menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada dana pusat menunjukkan bahwa ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum cukup berkembang untuk menopang pendapatan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjadi inovatif dan kreatif saat menyusun anggaran. Dikarenakan dengan meningkatnya belanja modal berdampak langsung pada pertumbuhan daerah, peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal dengan benar (Hidayat, 2013).

Anggaran belanja modal harus direncanakan dan dialokasikan dengan hati-hati agar alokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Belanja modal yang baik biasanya ditandai dengan perencanaan yang baik, pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dan pelaksanaan anggaran yang mencapai target. Pemerintah daerah idealnya mampu mendistribusikan anggaran belanja modal untuk membentuk modal dan investasi yang mendukung pembangunan daerah (Putra, 2022). Namun, kenyataannya alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih termasuk rendah dibandingkan dengan provinsi lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad pada Tahun 2017 tentang perkembangan belanja modal menurut provinsi-provinsi di Sumatera, Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan belanja modal tertinggi sebesar 41%. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penelitian dijelaskan bahwa belanja modal hanya sebesar 18%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalokasian belanja modal masih kurang tepat, sehingga tidak dapat meningkatkan permintaan produksi daerah (Fajri, 2017). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan alokasi belanja modal yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hal ini menjadi perhatian utama, terutama karena belanja modal yang masih rendah. Artinya, alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memanfaatkan sepenuhnya kekuatan ekonomi lokal. Belanja modal harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jalur transportasi, dan pusat ekonomi, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan menarik investasi, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan pelayanan masyarakat (Putri dkk, 2017). Berikut data Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



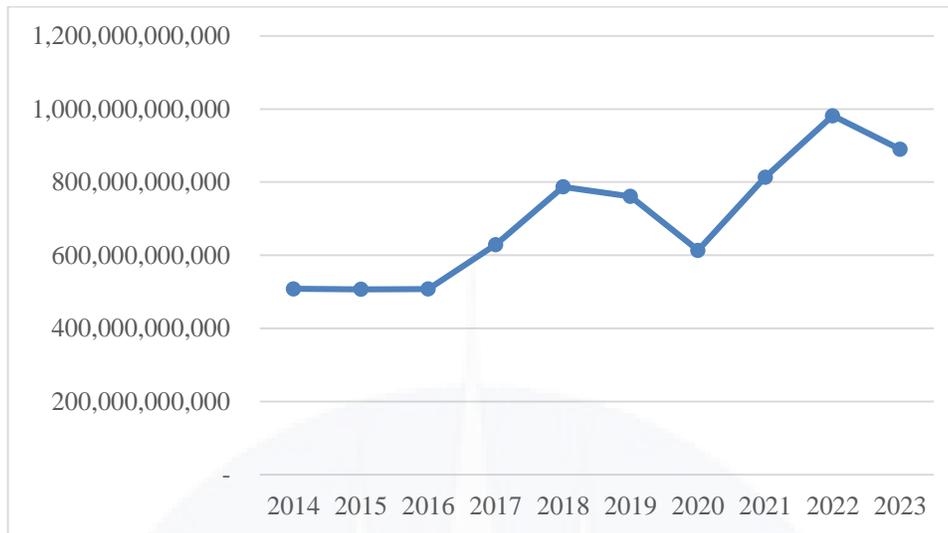
Gambar 1.1 Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Dalam rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Diolah 2025

Dari data pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014-2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Belanja Modal tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2023 sebesar Rp589.274.701.655, terjadinya peningkatan pada belanja modal disebabkan karena pemerintah daerah lebih memfokuskan anggaran pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023). Sedangkan belanja modal terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2016 sebesar Rp229.776.980.689, terjadinya penurunan pada belanja modal dikarenakan adanya penurunan signifikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Akibatnya berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, mengingat transfer ini merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah. Akibatnya, alokasi untuk belanja modal mengalami penurunan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016).

Terjadinya *Fluktuasi* pada belanja modal dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan anggaran daerah dan berdampak pada kurangnya infrastruktur yang memadai serta minimnya penambahan proyek infrastruktur baru. Pembenahan manajemen penerimaan daerah adalah salah satu cara yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi belanja modal. (Farhan dkk, 2023).

Pengeluaran daerah selalu bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut. Faktor yang memengaruhi belanja modal adalah jumlah pendapatan daerah yang berhasil diperoleh contohnya seperti pajak daerah. Peningkatan pendapatan pajak daerah didorong oleh peningkatan infrastruktur industri yang terintegrasi. Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas layanan umum dan fasilitas umum, masyarakat akan merasa lebih nyaman menjalankan usaha secara efisien dan efektif. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk belanja modal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah tujuan utama kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran pendapatannya secara optimal sangat penting, serta penerimaan pajak daerah yang meningkat memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki anggaran lebih besar untuk membiayai belanja modal seperti pembangunan infrastruktur (Hassan, 2016). Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.2 berikut:



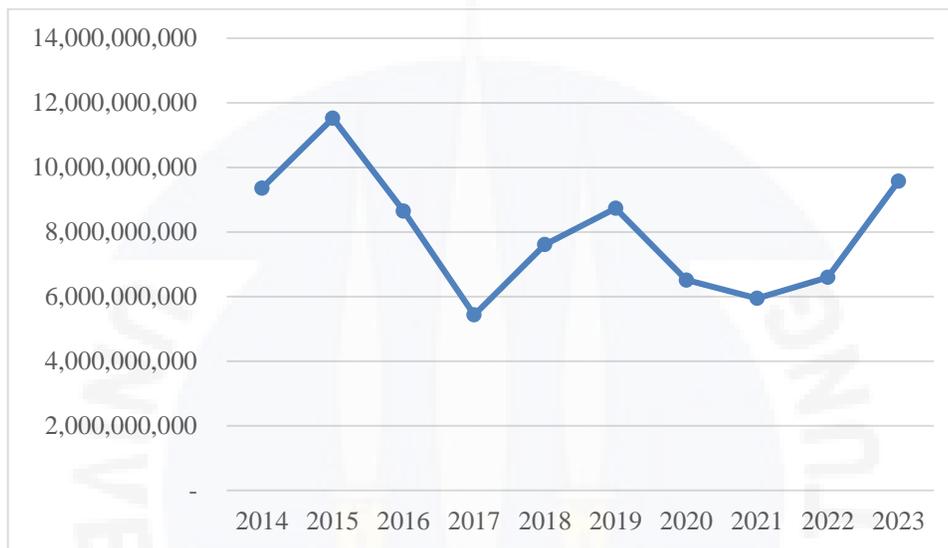
Gambar 1.2 Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Dalam rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Diolah 2025

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Pajak Daerah tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2022 sebesar Rp981.649.690.119. Sedangkan Pajak Daerah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2015 sebesar Rp506.944.936.060. Terjadinya peningkatan pada pajak daerah didorong oleh peningkatan infrastruktur industri yang terintegrasi. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan (Martini dkk, 2022). Dan terjadinya penurunan pada pajak daerah dikarenakan tingkat kemandirian fiskal yang rendah menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Kedua jenis pungutan ini bersifat wajib dan dikenakan kepada masyarakat. Jika masyarakat mematuhi kewajiban membayar keduanya, maka kesejahteraan bersama dapat tercapai. Retribusi daerah adalah pembayaran yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan seseorang atau badan. Peningkatan iuran retribusi daerah akan menyebabkan peningkatan penerimaan retribusi, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal dan memberikan layanan yang lebih baik (Hafizah & Yunilma, 2022). Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.3 berikut:



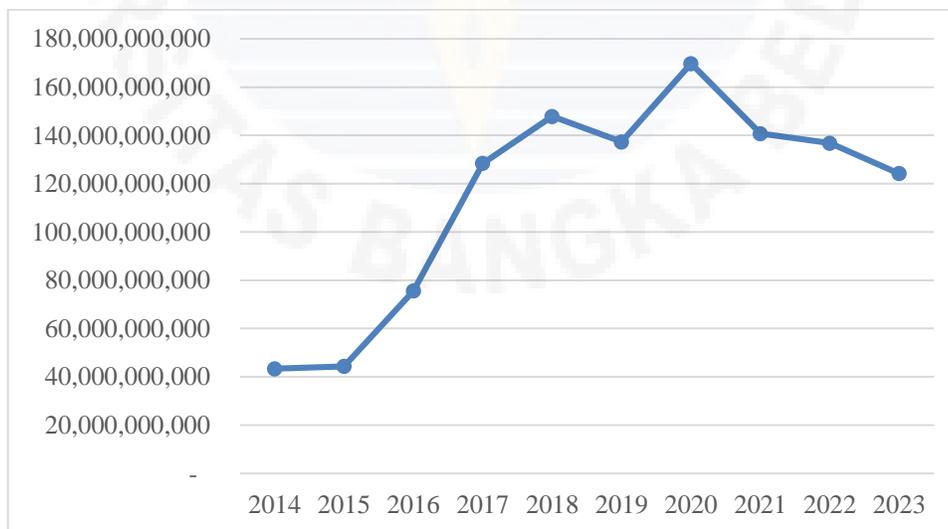
Gambar 1.3 Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Dalam rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Diolah 2025

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014-2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Retribusi Daerah tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2015 sebesar Rp11.520.365.059. Sedangkan Retribusi Daerah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2017 sebesar Rp5.434.540.818. Terjadinya peningkatan pada retribusi daerah menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pemungutan retribusi pada tahun tersebut. Dan terjadinya perbaikan kinerja pada beberapa lapangan usaha jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang terkait dengan layanan jasa. Sama seperti pajak daerah, terjadinya penurunan pada retribusi daerah dikarenakan tingkat kemandirian fiskal yang

rendah menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Salah satu transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dialokasikan secara spesifik untuk pembangunan infrastruktur adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, penyerapan berbasis kinerja, sinkronisasi pendanaan pembangunan lokal, dan penyediaan infrastruktur yang lebih cepat (Febriyanto, 2022). Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tingkat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana publik, penyerapan tenaga kerja dari proyek, dan pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pada saat yang sama, terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat akan semakin meningkat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sering kali menjadi pendorong utama Belanja Modal, terutama bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih relatif rendah. Berikut data Alokasi dan Realisasi Historis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Dalam rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Diolah 2025

Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2020 sebesar Rp169.739.866.295. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada Tahun 2014 sebesar Rp43.372.460.000. Terjadinya peningkatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menunjukkan bahwa adanya kinerja penyerapan anggaran yang baik di daerah tersebut.

Penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal sudah banyak dilakukan, dan hasil dari penelitian sebelumnya sangat beragam tergantung pada konteks daerah dan variabel yang digunakan. Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh (Ameilia dan Syaifuddin, 2022) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dimana peningkatan pajak daerah atau retribusi daerah tidak menyebabkan perubahan pada belanja modal. Jadi, meskipun pendapatan dari pajak atau retribusi naik, belanja modal tetap tidak bertambah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek yang berbeda yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan daerah ini masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan anggaran secara optimal. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan provinsi ini terhadap dana dari pemerintah pusat mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembangunan infrastruktur melalui belanja modal masih rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". Untuk melihat apakah variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal yang merupakan indikator penting dalam pembangunan daerah. Serta untuk mengetahui sejauh mana sumber pendapatan

daerah dapat membantu alokasi anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung.
- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung.
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pustaka untuk melengkapi kajian teoritis terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pembandingan bagi peneliti lain dengan penelitian sejenis untuk mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan Keuangan Daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan bukti teoritis terkait Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan sebagai strategi pengambilan kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibahas secara sistematis dalam beberapa poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai teori-teori yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Bab ini juga mencakup hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta variabel oprasional dan pengukuran variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil serta pembahasan masalah pada penelitian.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

